

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Zarra Aprilla¹⁾, Toto Kushartono²⁾, Dadan Kurnia³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul skripsi ini adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. . Pada aspek Bina Manusia, ditemukan bahwa kapasitas SDM masyarakat masih terbatas, terutama dalam pemahaman teknis dan kesadaran terhadap pentingnya ketahanan pangan sebagai kebutuhan strategis. Aspek Bina Usaha mengungkapkan bahwa potensi ekonomi lokal belum dikelola secara maksimal karena lemahnya dukungan kelembagaan, akses pasar, dan literasi usaha. Pada indikator Bina Lingkungan, masalah utama terletak pada rendahnya kesadaran kolektif terhadap pemeliharaan lingkungan dan kurangnya fasilitas penunjang seperti saluran irigasi dan pengelolaan limbah. Sementara itu, aspek Bina Kelembagaan menjadi tantangan paling krusial, di mana banyak lembaga desa seperti kelompok tani dan BUMDes masih berjalan secara administratif tanpa koordinasi strategis yang memadai, ditambah dengan keterbatasan SDM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat di Desa Cikole belum sepenuhnya efektif karena pendekatan program masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Keberhasilan ketahanan pangan memerlukan sinergi antarelemen desa yang kuat, peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistematis dalam bentuk pelatihan berbasis kebutuhan, pembentukan jejaring antar lembaga desa, serta pengembangan strategi pemberdayaan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dan tata kelola desa yang responsif.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, Desa Cikole

ABSTRACT

The title of this thesis is "Community Empowerment in the Food Security Program in Cikole Village, Lembang Subdistrict, West Bandung Regency." In the aspect of Human Development, it was found that the community's human resource capacity remains limited, particularly in terms of technical understanding and awareness of the importance of food security as a strategic need. The Business Development aspect reveals that the local economic potential has not been optimally managed due to weak institutional support, limited market access, and low business literacy. In the Environmental Development indicator, the main issues lie in the low collective awareness of environmental maintenance and the lack of supporting facilities such as irrigation channels and waste management systems. Meanwhile, the Institutional

Development aspect presents the most critical challenge, where many village institutions such as farmer groups and village-owned enterprises (BUMDes) operate administratively without sufficient strategic coordination, compounded by limited human resources in planning, implementation, and program evaluation. Overall, community empowerment in Cikole Village has not been fully effective because the program's approach remains sectoral and lacks integration. The success of food security requires strong synergy among village elements, continuous capacity building of human resources, and the strengthening of adaptive and collaborative institutions. Therefore, systematic interventions are needed in the form of needs-based training, the establishment of networks among village institutions, and the development of empowerment strategies based on active community participation and responsive village governance.

Keywords: Community Empowerment, Food Security, Cikole village

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Desa Cikole sebagai daerah agraris menghadapi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah desa dan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan.

Ketahanan pangan juga merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigas.

Penyelenggaraan pangan dapat dilakukan di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Bandung Barat. Desa Cikole Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai wilayah program ketahanan pangan, dimana lahan pertanian masih cukup banyak serta

penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Hasil observasi dan temuan dilapangan, peneliti melihat kesejahteraan petani dan peternak di sini dikatakan masih belum makmur dan sejahtera. Hal ini dikarenakan harga jual hasil panen dan ternak yang didapat tidak seimbang dengan modal kerja yang dikeluarkan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan petani dan peternak juga dirasa masih kurang.

Melihat hal tersebut, sesuai dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. mempunyai kewenangan mengembangkan pertanian dan peternakan dengan melakukan pemberdayaan kepada para petani. Salah satu daerah dilaksanakannya pemberdayaan petani dan peternak adalah Desa Cikole. Pemberdayaan yang dilakukan disini yaitu melalui penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi tentang teknologi baru serta cara bercocok tanam dengan cara yang lebih baik kepada kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Penyuluhan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat petani dalam menjalankan usaha taninya agar mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih baik serta beragam. Hasil yang lebih baik tersebut dapat menunjang terwujudnya suatu ketahanan pangan.

Stabilitas ketahanan pangan adalah hal yang sangat di harapkan oleh masyarakat di setiap wilayah, termasuk di Desa Cikole keterbatasan akses terhadap sumber daya, ekonomi masih menjadi hambatan di desa tersebut. Peningkatan ketahanan pangan di Desa Cikole merupakan tujuan penting yang harus dicapai melalui upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal mereka perlu diidentifikasi dan dievaluasi untuk mencapai tujuan tersebut dibidang pertanian dan peternakan.

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran yang dibutuhkan desa untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya dalam pemberdayaan

masyarakat desa. Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yaitu perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang.

Pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pangan yang diharapkan Pemerintah Desa masyarakat. Meskipun program ketahanan pangan telah digagas dan dijalankan di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pemberdayaan masyarakat dalam program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini menghambat pencapaian tujuan program, yaitu peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pedesaan melalui ketahanan pangan.

Dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan strategi dan solusi yang lebih baik dalam pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Dalam proses pemberdayaan perlu juga ditingkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk menumbuh kembangkan perilaku yang berbudaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini berfokus untuk mencari informasi, menganalisis, serta mendeskripsikan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Lokasi penelitian adalah di Kantor Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini didasari berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Disamping itu, berdasarkan data demografi desa mencakup bahwa 60% masyarakat Desa Cikole berprofesi sebagai petani (diluar dari usia tidak bekerja, ASN, dan pensiunan). Desa Cikole sudah memiliki beragam capaian prestasi akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan yang dilakukan peneliti menemukan permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cikole.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci, dengan pedoman yang disusun berdasarkan fokus penelitian, untuk menggali informasi dari para informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat serta program ketahanan pangan.

Proses analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai human instrument. Peran penulis di sini sebagai *interviewer*, *observer*, dan juga dokumenter. Dengan beragamnya narasumber yang akan dimintai keterangan, penulis akan menjadi pendengar, pencatat, dan juga pengamat. Saat observasi,

sesekali penulis melakukan observasi partisipatif aktif. Selain mencatat, mendengar, dan mengamati dalam proses mengumpulkan data, peneliti juga harus terlibat lebih jauh dalam penelitian dengan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya interpretasi responden yang terbentuk selama penelitian. Peneliti secara eksplisit mengidentifikasi secara refleksi bias, nilai-nilai, dan latar belakang pribadi mereka, seperti jenis kelamin, sejarah, budaya, dan status sosial-ekonomi (SES) yang membentuk interpretasi mereka, yang terbentuk selama penelitian. Data yang baik dalam suatu penelitian adalah yang dapat di percaya kebenarannya, tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang luas untuk dapat menarik kesimpulan. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. antarsektor dijalankan. Evaluasi strategi menyoroti mekanisme pemantauan dan pengukuran keberhasilan dari implementasi strategi tersebut serta sejauh mana langkah korektif dilakukan untuk perbaikan kebijakan.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Peneliti melakukan sebuah pertimbangan dalam menentukan unit-unit dan sumber-sumber untuk meningkatkan keberhasilan sehingga harus mempertimbangkan peran yang terlibat. Alasan peneliti melakukan di Desa Cikole dikarenakan wilayah tersebut relevan dengan konteks penelitian yang mengacu pada fenomena permasalahan yang terjadi.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti menggunakan empat kriteria trustworthiness menurut Lincoln dan Guba, yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kredibilitas dicapai dengan melakukan konfirmasi kepada informan (member checking) serta triangulasi data. Transferabilitas dijamin melalui deskripsi kontekstual yang rinci, dependabilitas dicapai dengan mencatat proses penelitian secara transparan dan sistematis, sementara confirmability diwujudkan melalui upaya menjaga

objektivitas dan netralitas peneliti selama proses pengumpulan dan analisis data.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Pemberdayaan masyarakat dan pangan diformulasikan, dijalankan, dan dievaluasi. Dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis, baik bagi pengambil kebijakan, dalam memahami pemberdayaan masyarakat di Desa Cikole Kecamatan Lembang.

PEMBAHASAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA CIKOLE

Program ketahanan pangan di tingkat desa pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019:114), yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus mencakup empat aspek penting, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Keempat aspek ini saling terhubung secara fungsional dan menjadi fondasi dalam membangun ketahanan pangan berbasis lokal. Secara keseluruhan, Desa Cikole merupakan desa yang kaya akan potensi pertanian dan pariwisata, serta memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Meskipun menghadapi tantangan terkait potensi bencana alam, desa ini terus berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Perumusan Strategi

Dalam tahap perumusan strategi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan inisiatif penting dengan merumuskan visi dan misi

daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang sehat, dan makmur. Penyusunan strategi formal ini disertai dengan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), yang mendasari arah kebijakan daerah. Perumusan strategi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat secara normatif telah mengidentifikasi arah dan prioritas kebijakan secara tepat. Namun, dokumen strategi cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya dikaitkan dengan dinamika sosial-budaya serta kebutuhan masyarakat akar rumput. Dalam banyak kasus, kebijakan hanya menjadi dokumen legal tanpa kekuatan implementatif yang kuat di lapangan.

Implementasi Strategi

Tahap implementasi strategi pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk modal usaha dan pembiayaan melalui program-program seperti kredit mikro, pinjaman produktif, atau penyediaan modal awal untuk inisiatif- usaha masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat Desa Cikole untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Penyuluhan dan informasi merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dapat menyediakan akses yang mudah terhadap informasi terkait peluang usaha, program pembangunan, peraturan, dan kebijakan terkait perekonomian. Dengan demikian, masyarakat Desa Cikole akan memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang yang ada. Keputusan Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa merupakan aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat. Desa Cikole dapat mendorong partisipasi melalui mekanisme seperti musyawarah desa, pembentukan forum komunikasi masyarakat, atau keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan desa, termasuk dalam upaya meningkatkan perekonomian. Komponen-komponen ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam merancang strategi

pemberdayaan masyarakat di Desa Cikole, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Evaluasi Strategi

Tahap evaluasi strategi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dirancang dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam praktiknya, evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cikole yang masih bersifat administratif dan reaktif. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya dijadikan seremonial, tapi benar-benar dimaknai sebagai proses panjang perubahan perilaku. Dengan metode-metode seperti demplot (demonstrasi plot) dan sekolah lapang, masyarakat belajar melalui praktik langsung yang mudah dipahami dan aplikatif. Lingkungan desa juga menunjukkan perubahan: kini lebih banyak warga yang memanfaatkan lahan pekarangan, dan diskusi tentang pangan sehat dan mandiri semakin sering terdengar di ruang-ruang warga. Dapat dirumuskan pemberdayaan masyarakat ialah salah satu perbaikan mutu dan kualitas hidup masyarakat dari yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan menjadi masyarakat yang berdaya dari segi perekonomian dan ketahanan pangan yang dibantu oleh pemerintah melalui beberapa program nasional

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Cikole sangat ditentukan oleh kekuatan sinergis dari keempat indikator utama pembangunan desa, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Keempat indikator ini membentuk fondasi utama dalam sistem pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

Bina Manusia. Indikator Bina Manusia menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Cikole masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kapasitas teknis dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan. Banyak warga belum memahami pentingnya kemandirian pangan secara menyeluruh, meskipun mereka telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pemberdayaan belum membentuk perubahan perilaku yang signifikan karena pendekatannya

masih berorientasi pada formalitas program, bukan transformasi pola pikir. Padahal, keberhasilan ketahanan pangan sangat bergantung pada manusia sebagai subjek utama perubahan.

Bina Usaha. Dari sisi Bina Usaha, potensi ekonomi lokal masyarakat melalui pertanian, usaha mikro, dan pengolahan hasil pertanian sebenarnya cukup besar, namun belum sepenuhnya dikelola secara produktif dan berorientasi pasar. Sebagian besar usaha masih bersifat rumah tangga, belum memiliki akses pasar yang luas, dan kurang mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital, maupun akses permodalan. BUMDes dan kelompok usaha desa belum optimal dalam menjalankan fungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam aspek usaha memerlukan pendekatan lebih strategis dan fasilitasi yang konkret untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat desa.

Bina Lingkungan. Indikator Bina Lingkungan mengungkapkan adanya kesenjangan nyata antara kebutuhan fasilitas umum dan kondisi lingkungan aktual di lapangan. Persoalan seperti jalan rusak, saluran air tersumbat, dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kesadaran kolektif masyarakat masih rendah dalam merawat fasilitas umum, dan tidak adanya sistem pemeliharaan yang berkelanjutan mengakibatkan banyak fasilitas menjadi terbengkalai. Ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik tanpa pendekatan sosial dan kesadaran lingkungan hanya akan menimbulkan masalah baru dan membatasi efektivitas program ketahanan pangan, yang sangat tergantung pada ekosistem lingkungan yang mendukung.

Bina Kelembagaan. Indikator Bina Kelembagaan menjadi titik krusial dari permasalahan yang ditemukan dalam implementasi program ketahanan pangan. Walaupun kelembagaan desa secara struktural telah terbentuk, namun fungsinya masih belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi, serta belum adanya sistem kaderisasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Banyak pengurus lembaga desa belum memiliki kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan, maupun evaluasi program secara profesional. Kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat justru sering berjalan parsial dan tidak saling bersinergi. Tanpa tata kelola kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten, pemberdayaan masyarakat cenderung terhambat dan program hanya menjadi formalitas administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas: Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Adisasmito, W. (2014). *Pengembangan masyarakat dan pembangunan kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Jakarta: Kencana.*
- Craswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Greasley, K. (2004). *Employee perceptions of empowerment. Employee Relations, 26(4), 354–368.*
- Hardani, et. Al. 2020. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu*
- Hikmat, H. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.*
- Kabeer, N. (1994). *Reversed realities: Gender hierarchies in development thought. London: Verso.*
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: CIDES-Indonesian Development Studies.*
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Subianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Prijono, S., & Pranarka, A. M. W. (Eds.). (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi. Jakarta: CSIS.*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.*
- Suparjan, & Suyatno, H. (2003). *Pemberdayaan masyarakat: Model, strategi, dan implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Suharto, Edi. 2007. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.*

Dokumen:

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Republik Indonesia. *Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*